



KR GROUP
http://www.krjogja.com

Kedaulatan Rakyat

Suara Hati Nurani Rakyat

Terbit Sejak 27 September 1945



BERLANGGANAN
SCAN BARCODE



RABU LEGI

7 AGUSTUS 2024 (1 SAPAR 1958 / TAHUN LXXIX NO 295)

HARGA RP 4.000 / 16 HALAMAN

HADAPI PANSUS HAJI DPR Kemenag Siapkan Data dan Dokumen

JAKARTA (KR) - Kementerian Agama (Kemenag) telah menyiapkan berbagai data dan dokumen yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Pansus Haji. Berbagai argumen dan juga data maupun dokumen untuk merespons apa yang nanti akan menjadi pertanyaan fundamental dari Pansus tersebut.

Hal tersebut disampaikan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief dalam Diskusi Publik Forjukafi: Haji Antara Transformasi dan Politisasi di Hotel Oasis Amir Jakarta, Selasa (6/8). "Jumlah jemaah yang harus kami layani sangat besar yaitu dengan kuota 221.000 plus 20.000 tambahan jadi 241.000 orang dan itu pertama kali dalam sejarah dengan jumlah sebanyak itu," ujarnya.

Berbagai langkah, kata Hilman, sudah dilakukan oleh Kemenag dalam mempersiapkan haji. Langkah ini dilakukan oleh Kemenag untuk penyelenggaraan haji yang aman dan nyaman. "Karena itu kita mencoba melakukan berbagai persiapan, telaah, simulasi, kajian, dimana kita menginginkan ada satu skenario yang bisa kita gunakan di tahun kemarin dengan prinsip sebagaimana hasil daerah * Bersambung hal 7 kol 5



KR-Antara/Fakhri Hermansyah

BARANG IMPORTASI ILEGAL: Petugas memeriksa bukti kain gulungan impor ilegal di Tempat Penimbunan Pabean (TPP) Bea dan Cukai, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (6/8/2024). Satgas Importasi Ilegal mengamankan 4.927 balpres pakaian bekas, kain gulungan 20.000 rol, 695 produk jadi, 332 pack tekstil, 43 kosmetik, 371 alas kaki, 6.578 elektronik, dan 5.896 barang garmen senilai Rp 46.188.205.400.

Dari China, Korea dan Jepang

1.883 Bal Pakaian Bekas Disita

JAKARTA (KR) - Bareskrim Polri yang tergabung dalam Satgas Importasi Ilegal menyita 1.883 bal pakaian bekas atau balpres dari dua lokasi, yakni Kota Bandung dan Cikarang Bekasi Jawa Barat. Penyitaan tersebut dilakukan untuk menyelamatkan UMKM.

Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol. Wahyu Widada dalam konferensi pers di Penimbunan Pabean Bea dan Cukai Cikarang Bekasi, Selasa (6/8) mengatakan, masuknya pakai-

an bekas dari China, Korea, dan Jepang tersebut dapat mengakibatkan *multiplier effect* karena tidak hanya merugikan dari sisi penerimaan negara, tetapi juga berdampak pada para pengusaha industri dalam negeri dan UMKM.

"Bisa dibayangkan dengan harga baju yang kalau dijual eceran gini saja nilai impor satu pieces saja sudah berapa ribu (rupiah). Tetapi bisa dijual dengan nilai yang sangat-sangat murah di mana kita bisa bersaing.

Multiplier effect-nya banyak. Pabrik-pabrik garmen kita tutup, UMKM kita tidak bisa bersaing. Sementara kita menyadari bahwa UMKM adalah salah satu tulang punggung perekonomian kita," kata Wahyu.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, selain Bareskrim yang menyita ribuan balpres, Ditjen Bea dan Cukai melalui Kantor Pelayanan Bea Cukai Tanjung Priok

* Bersambung hal 7 kol 5

Analisis Komoditas Akademik

Dr Sumbo Tinarbuko MSn



PERBURUAN jabatan fungsional guru besar alias profesor menjadi trending topik di linimasa medsos. Kisahnya berkumandang sedemikian rupa di lingkungan dosen karier yang memiliki pangkat Lektor Kepala untuk naik jabatan fungsional guru besar.

Cerita bernada minor juga menjadi bumbu penyedap bagi dosen karier lektor kepala bergelar doktor yang berupaya maju menjadi profesor.

* Bersambung hal 7 kol 1

JADWAL SALAT	Zuhur	Asar	Magrib	Isya	Subuh
	11:48	15:08	17:42	18:53	04:32

Rabu, 7 Agustus 2024 Sumber: Kementerian Agama Kanwil Provinsi DIY

SUNGGUH SUNGGUH TERJADI

● SABTU 27 Juli 2024 sore, saat lewat perempatan jalan di Slawi Tegal. Di situ terpasang papan pengumuman "Stop Memberi Uang Kepada Peminta-minta dan Pengamen di Traffic Light. Tetapi di situ ada peminta-minta dan pengamen beraksi. Mungkin pengumuman itu tidak terbaca, mungkin juga sengaja diilanggar. (Sutono, Harjosari Kidul, Adiwerna Tegal)

KETUA DPRD DIY NURYADI

Yogya Jadi 'Supermarket' Bencana, Pemangku Kepentingan Harus Bertindak Tepat



FORUM DPRD DIY

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) baru saja mengeluarkan peringatan dini tentang ancaman kekeringan dan kebakaran hutan. Peringatan ini harus disikapi dengan serius oleh Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), mengingat daerah ini sering menghadapi kedua bencana tersebut.

Ketua DPRD DIY Nuryadi, mengungkapkan bahwa DIY sejak lama disebut sebagai "supermarket" bencana karena berada di kawasan cincin api. Oleh karena itu, semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, harus memahami cara bertindak ketika ada ancaman bencana. Sehingga langkah yang diambil tepat, guna mengurangi bencana yang muncul.

"Kita punya semua jenis bencana, mulai dari banjir, tanah longsor, gunung berapi, hingga sampah yang belum terselesaikan. Saat musim kemarau, ada kekeringan air dan kebakaran; saat musim hujan, bisa terjadi tanah longsor dan banjir. Peringatan BMKG tentang potensi

kebakaran hutan harus disikapi dengan serius oleh pemerintah daerah dan masyarakat," kata Nuryadi di DPRD DIY, Senin (5/8).

Nuryadi mengatakan bahwa meskipun tidak besar, DIY memiliki hutan di Gunungkidul, Kulonprogo, Bantul, dan Sleman. Situasi ini perlu perhatian dari semua pihak agar peringatan dini BMKG tidak menjadi kenyataan atau setidaknya dapat diminimalisasi.

"Dalam situasi normal, kita punya wilayah kekeringan tinggi seperti Gunungkidul. Hutan kita sedikit, jadi jika sampai kebakaran, sangat berbahaya. Kita bisa berperan dengan tidak sembarangan membuang puntung rokok di area kering, atau melakukan hal-hal sederhana lainnya. Perlu kesadaran masyarakat untuk meminimalisasi dampak buruknya," lanjutnya.

Selain itu, instansi terkait harus tetap bersiap karena banyak wilayah hutan di Gunungkidul dan Kulonprogo yang belum berpenghuni. Jika terjadi kebakaran, penanganannya tidak bisa cepat dilakukan oleh masyarakat.

"Banyak wilayah di Gunungkidul yang belum berpenghuni. Masyarakat memiliki lahan



KR-FX Harminanto

Ketua DPRD DIY Nuryadi saat menyampaikan pandangannya tentang antisipasi bencana alam di DIY.

besar dengan tanaman yang sangat mudah terbakar saat kering. Menghilangkan sampah dengan membakar juga cukup berbahaya, meskipun di pelosok ini mungkin menjadi solusi. Dalam kondisi kemarau, ini sangat berbahaya, jadi masyarakat harus paham betul," tambah politisi senior PDI Perjuangan ini.

Diungkapkannya, kondisi geografis DIY yang di bagian utara terdapat Gunung Merapi yang megah. Sedangkan di sisi selatan terdapat laut yang indah. Dan keberadaan gunung maupun laut tersebut juga memiliki konsekuensi tersendiri.

Seperti diketahui status Gunung Merapi saat ini masih di level III atau Siaga sejak 5 November 2020 lalu. Dan sampai sekarang aktivitas erupsinya masih terus terjadi, meskipun tidak sebesar 2010 lalu.

Selain itu, gempa yang berpusat di dasar laut juga beberapa kali terjadi. Bahkan juga dirasakan sebagian masyarakat DIY. Terutama yang tinggal di sisi selatan. Ini menandakan potensi bencana baik erupsi maupun gempa masih dapat terjadi sewaktu-waktu.

"Mitigasi bencana harus dimiliki oleh masyarakat maupun instansi terkait. Apalagi beberapa bencana yang terjadi memang sudah jadi 'langganan'," ungkapnya.

Dukungan Anggaran DPRD DIY, menurut

Nuryadi, siap memberikan dukungan serta menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pemerintah daerah. Dewan juga siap membantu melalui penganggaran kesiapsiagaan penanganan bencana.

"DIY memiliki anggaran untuk kebencanaan yang harus selalu siap. Kami dari dewan siap mendukung anggaran untuk antisipasi bencana. Kami mengingatkan masyarakat, namun menyadari bahwa bukan sepenuhnya kesalahan mereka jika bencana terjadi. Kami siap mendukung penganggaran, ini adalah prioritas," tegasnya.

Untuk itu dari pemerintah kabupaten/kota juga idealnya dapat menyesuaikan dari sisi penganggaran. Terutama untuk kabupaten/kota yang memang rutin ter-

jadi bencana. Baik saat musim hujan maupun kemarau.

Dalam perbincangan yang dipandu wartawan senior *Kedaulatan Rakyat*, Primaswolo Sudjono dalam program Forum DPRD DIY, Nuryadi juga membahas terkait pariwisata dan kesiapsiagaan bencana yang harus berjalan beriringan. DIY adalah destinasi unggulan yang dikunjungi jutaan wisatawan setiap tahun, namun di sisi lain memiliki potensi bencana yang besar.

"Masyarakat harus menjadi subjek dalam pembangunan dan pariwisata, karena bagaimanapun sektor tersebut penyumbang pendapatan daerah bagi DIY. Namun, kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana harus menjadi prioritas utama," tandas legislator dari Gunungkidul ini.

Nuryadi juga membahas persoalan sampah yang hingga kini belum teratasi, terutama di Kota Yogyakarta. Ia menilai kebijakan Pemda DIY sudah sangat baik, namun perlu komunikasi lebih lanjut dengan kabupaten/kota sebagai penanggung jawab kebijakan.

"Kebijakan Ngarsa Dalem (Sultan Hamengku Buwono X) di daerah ini sangat baik dan diharapkan dapat terkomunikasikan dengan kabupaten/kota. Soal biaya pasti bisa dibicarakan. Apalagi setiap tahun kita punya dana keisti-

mewaan. Sultan sangat peduli dan soal anggaran tidak menjadi masalah asal bisa dibuktikan. Di Kota Yogyakarta sering salah kaprah bahwa kewenangan sampah ada di kabupaten/kota bukan di provinsi. Kami membuka ruang anggaran, harapannya segera selesai dengan koordinasi tingkat satu dan dua," pungkasnya.

Komunikasi Daerah
Nuryadi menekankan pentingnya komunikasi antara Pemda DIY dengan pemerintah kabupaten/kota terkait penanganan sampah ini. Apalagi setiap warga masyarakat pasti memproduksi sampah. Gubernur DIY juga dapat mengupayakan penanganan sampah melalui Dana Keistimewaan.

"Selama pemerintah kabupaten/kota dapat membuktikan keseriusannya dalam menangani sampah, saya yakin gubernur tidak akan keberatan jika dana keistimewaan digunakan. Jadi jangan seolah-olah sampah menjadi kewajiban Pemda saja. Harus ada koordinasi bersama," katanya.

Nuryadi tidak dapat memastikan apakah ada target tahun tertentu untuk menyelesaikan masalah sampah di DIY, namun jika bisa secepatnya, akan lebih baik. Karena sampah adalah produk dari semua orang dan jangan sampai justru menjadi bencana jika tidak tertangani dengan baik. (Fhx/Awh)-d



YouTube Kedaulatan Rakyat TV



Simak juga wawancara di :

krjogja.com



krjogja.com



Kedaulatan Rakyat @Krdjogjadotcom



TikTok KedaulatanRakyat @Krdjogjadotcom